



F-PKS Kota Yogya Tolak Kenaikan Harga BBM

YOGYA (KR) - Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penolakan ini mereka sampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna tentang Rancangan Perubahan APBD Kota Yogya 2022, Selasa (6/9).

"Oleh karena itu Fraksi PKS tegas menolak kenaikan BBM karena akan menghambat upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi," terang Juru Bicara F-PKS M. Fauzan saat membacakan Pandangan Umum.

F-PKS menarik postur Rancangan Perubahan APBD Kota Yogya 2022, tak mengestimasi dampak kenaikan harga BBM. "Fraksi PKS mengamati perubahan APBD 2022 ini belum memasukkan unsur kenaikan harga BBM," katanya.

Fauzan mengatakan, adanya optimisme kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keyakinan itu salah

satunya berdasarkan asumsi dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat. Hanya saja, hitungannya tidak realistis karena akan ada implikasi dari kebijakan kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.

"Karena transportasi akan naik harganya, sementara pariwisata merupakan kebutuhan sekunder yang tentu akan terkena dampak dari daya beli masyarakat yang turun. Sehingga calon wisatawan yang akan menginap serta belanja makan minum juga akan berpikir panjang," ucapnya.

Selain sektor wisata, hitung-hitungan alokasi anggaran yang dianggap tak realistis pada program bantuan sosial.

"Penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan BBM dengan besaran alokasi 2% yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU), kebijakan tersebut merupakan amanat dari pemerintah pusat, Fraksi PKS menilai alokasi itu tidak seimbang dengan

dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat," terang Wakil Ketua F-PKS itu. **(Dev)-f**



KPR-Istimewa

F-PKS Kota Yogya mengungkat poster berisi penolakan kenaikan harga BBM.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005